



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)

**KECAMATAN PONCOWARNO
KABUPATEN KEBUMEN**

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan lancar. Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan kami dalam melakukan penyusunan laporan ini baik dari kedalaman dan substansi, data pendukung maupun sistematika pelaporan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak yang terkait sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di tahun-tahun mendatang.

Poncowarno, 31 Januari 2023

CAMAT PONCOWARNO
KABUPATEN KEBUMEN



SULIN, S.STP, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19791221-199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
EKSEKUTIF SUMMARY iii

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Struktur Organisasi..... 6
1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama..... 14

BAB II. PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis..... 16
2.2. Perjanjian Kinerja 20

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 24
3.2. Realisasi Anggaran 30
3.3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 36

BAB IV. PENUTUP
4.1. Kesimpulan 37
4.2. Rencana Tindak Lanjut 38

LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja

Target dan Realisasi Keuangan dan Fisik.

EKSEKUTIF SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang disampaikan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Poncowarno.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dihasilkan.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Kecamatan Poncowarno menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Bupati paling lambat 2 (bulan) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hasil Pengukuran Kinerja Kecamatan Poncowarno

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran 1 (satu) strategis dengan 4 (empat) program beserta indikator kinerja dengan diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 untuk Kecamatan Poncowarno diperoleh hasil dengan skor 91,22 kategori Baik.

- b. Serapan anggaran belanja langsung (belanja program/kegiatan/sub kegiatan) Kecamatan Poncowarno pada Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.2.072.130.000,00 (*dua milyar tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.1.925.888.212,00 (*satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah*) atau terserap 92,94%.

Rekomendasi dan Catatan Penting

Rekomendasi dan catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan (n+1), diantaranya:

- a) Meningkatkan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah kecamatan yang efektif, efisien responsif, transparan dan akuntabel;
- b) Meningkatkan pengelolaan, pendayagunaan dan pengamananan aset daerah/desa;
- c) Mendorong terciptanya produk hukum tingkat desa untuk mendukung pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas pelaksanaan pembangunan;
- d) Meningkatkan sistem evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tingkat desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

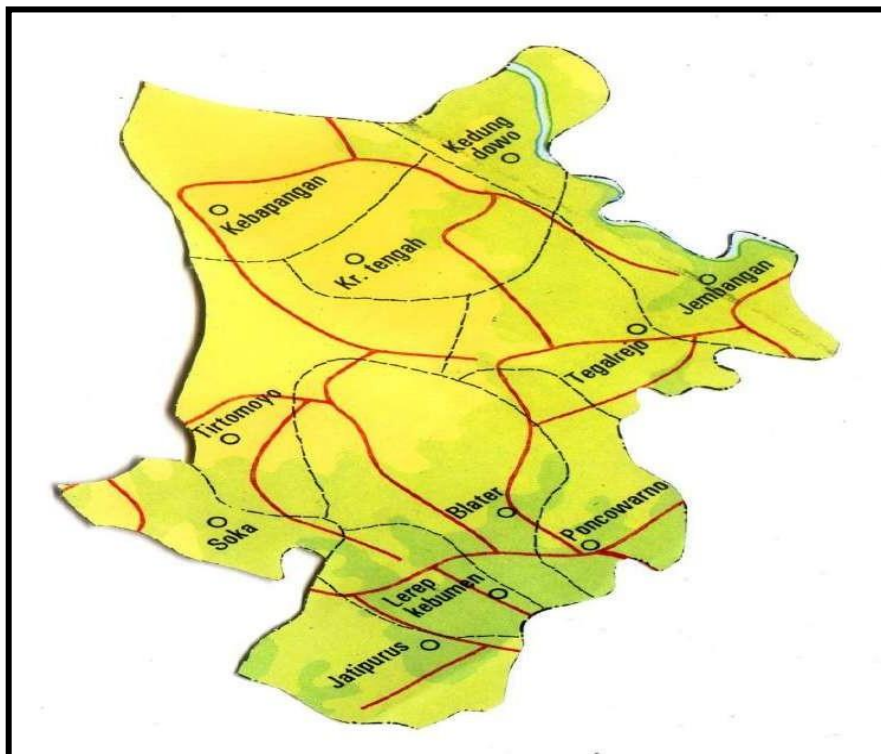
A. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Poncowarno merupakan salah satu kecamatan dari 26 (dua puluh enam) kecamatan di Kabupaten Kebumen. Kecamatan Poncowarno merupakan kecamatan pemekaran dari wilayah Kecamatan Alian, yang peresmian pemekarannya dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2004. Hal ini tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 44/XII/1989 tentang Pemekaran Kecamatan Perwakilan.

Kecamatan Poncowarno adalah salah satu dari dua puluh enam kecamatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.628 Ha, dengan ketinggian rata-rata 23-30 m dari permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata per tahun 201–205 mm dan keadaan suhu rata-rata 31–33°C. Secara astronomis, Kecamatan Poncowarno terletak antara 109,74° BT–7,68° LS, dan secara administrasi, batas wilayah Kecamatan Poncowarno adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kebumen
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Padureso dan Prembun
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alian; dan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kutowinangun.

Gambar 1.1.
Peta Administrasi Kecamatan Poncowarno



Sedangkan secara administrasi pemerintahan, Kecamatan Poncowarno terdiri dari 11 (sebelas) pemerintah desa, yaitu: Jatipurus, Lerepkebumen, Blater, Poncowarno, Tegalrejo, Jembangan, Karangtengah, Kedungdowo, Kebapangan, Tirtomoyo, dan Soka.

Gambaran Penduduk di Kecamatan Poncowarno sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1.

Jumlah Penduduk Kecamatan Poncowarno
Tahun 2022

No .	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - laki	Perempua n	
1.	Jatipurus	618	589	1.207
2.	Lerepkebumen	944	913	1.857
3.	Blater	818	759	1.577
4.	Poncowarno	773	794	1.567
5.	Tegalrejo	429	429	858
6.	Jembangan	1.063	1023	2.086
7.	Kedungdowo	248	247	495
8.	Karangtengah	1.016	1.018	2.034
9.	Tirtomoyo	1.367	1.288	2.655
10.	Soka	1.681	1.548	3.229
11.	Kebapangan	843	846	1.689
	TOTAL	9.800	9.454	19.254

*Sumber : Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kebumen
Tahun 2022*

Berdasarkan Tabel 1.1. Kecamatan Poncowarno memiliki penduduk sebanyak 19.254 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 50,90% dan perempuan sebanyak 49,10%, kondisi ini menggambarkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk perempuan.

Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 terdiri dari 10 Taman Kanak-Kanak dengan jumlah 249 siswa dan 21 orang guru, 14 sekolah SD/Sederajat jumlah 1.688 siswa dan 10 orang guru, 2 SMP/Sederajat dengan jumlah 648 siswa.

Fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Poncowarno terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 unit, Puskesmas Pembantu 2 unit dan Pelayanan Kesehatan Desa (PKD) sebanyak 8 unit, Posyandu 32 unit, Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) sebanyak 11 unit dengan

dukungan tenaga medis dan paramedis terdiri dari : Dokter Umum 2 orang, Dokter Gigi 1 orang, perawat 10 orang, bidan 16 orang, petugas farmasi 2 orang dan petugas gizi 1 orang, paramedis dan jabatan fungsional kesehatan lainnya.

Sedangkan tenaga kader kesehatan tersebar di seluruh desa di Kecamatan Poncowarno. Puskesmas Poncowarno melayani imunisasi bayi dan ibu hamil, IVA, pengobatan umum, antigen, swab, bulan vitamin A, Posyandu, Posbindu, roothepoth untuk kesehatan haji, penyuluhan-penyuluhan tentang kesehatan, bidan desa melayani PKD rawat inap untuk ibu hamil dan kegiatan lain yang menjadi kewenangan puskesmas.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang perekonomian di Kecamatan Poncowarno terdapat pasar desa sebanyak 2 (dua) buah yaitu Pasar Munggang Sari Desa Poncowarno dan Pasar Pencil Desa Tegalrejo. Keberadaan kedua pasar desa tersebut sangat mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat di Wilayah Kecamatan Poncowarno dan sekitarnya. Hal ini disebabkan keberadaan kedua Pasar Desa tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat perdagangan masyarakat Kecamatan Poncowarno akan tetapi juga masyarakat sekitar Kecamatan Poncowarno seperti Kutowinangun, Prembun, Kebumen dan Padureso. Komoditi terutama hasil pertanian, pedagang maupun pembeli berasal dari dalam maupun luar Kecamatan Poncowarno. Dari sisi Pendapatan Asli Desa kedua Pasar Desa tersebut memberikan kontribusi kepada Pemerintahan Desa melalui retribusi dari pedagang maupun dari sewa kios yang dimiliki oleh desa.

Demikian juga keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian masyarakat desa maupun terhadap Pendapatan Asli Desa. BUMDes yang aktif di Kecamatan Poncowarno ada 3 (tiga) unit yakni, 1) BUMDes Tegalrejo dengan bentuk usahanya pengelola petronas, kios pertanian dan pengelolaan pasar desa; 2) BUMDes Tirtomoyo dengan bentuk usaha pengelola Wisata Alam Prabu (WAP) dan pengelola air minum isi ulang Prabu; dan 3) BUMDes Poncowarno dengan bentuk usaha pengelola Pertashop dan percetakan.

Potensi sumber daya alam yang digunakan sebagai obyek pariwisata antara lain Obyek pariwisata Jembatan Wisata Air (JWA) di Desa Jembatan, Wisata Alam Prabu (WAP) di Desa Tirtomoyo dan Kedungdowo Adventure Park di Desa Kedungdowo semuanya merupakan destinasi pariwisata yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

Dalam menjalankan tugasnya, Camat Poncowarno dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris Camat, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 6 (enam) orang Staf dan 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas.

B.Kapabilitas SDM Kecamatan

Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Poncowarno terdiri dari Sumber daya manusia yaitu Personil/Pegawai sebagai pelaku untuk mendukung pelaksanaan Program/kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pekerjaan.

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Poncowarno berjumlah 15 orang dengan rincian :

- a.Pejabat Struktural : 7 orang
- b.Staf : 6 orang

Susunan Staf Kecamatan Poncowarno

- a. Staf Sekretariat : 4 orang
- b. Staf Tata Pemerintahan : - orang
- c. Staf PM : 1 orang
- d. Staf Trantib : - orang
- e. Staf Yanmum & Kesos : 1 orang

2. Data Kepegawaian

a. Data Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Tingkat Pendidikan

Pegawai Kecamatan Poncowarno menurut tingkat pendidikan secara umum didominasi oleh lulusan SLTA yaitu 6 orang atau sekitar 42,86%, dan secara rinci tersaji pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SLTP	-
2.	SLTA	5
3.	Sarjana /S1	4
4.	Pasca Sarjana/S2	4
	JUMLAH	13

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Poncowarno, 2022

b. Data Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Jenis Kelamin

Pegawai Kecamatan Poncowarno menurut jenis kelamin didominasi oleh pria yaitu berjumlah 10 orang, dan 5 orang wanita secara rinci disajikan pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
 Pegawai Kecamatan Poncowarno
 Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Pegawai pada Sekretariat/Seksi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretariat	1	-	1
3.	Subag Umpeg	1	1	2
4.	Subag PK	2	2	4
5.	Seksi Tapem	-	-	-
6.	Seksi PM	1	1	2
7.	Seksi Trantib	1	-	1
8.	Seksi Yanmum & Kesos	1	1	2
	JUMLAH	8	5	13

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Poncowarno, 2022

- c. Data Pegawai Kecamatan Poncowarno Menurut Golongan Ruang
 Pegawai Kecamatan Poncowarno menurut golongan ruang secara umum didominasi golongan III yaitu sebanyak 7 orang, dan secara rinci disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
 Pegawai Kecamatan Poncowarno
 Menurut Golongan Tahun 2022

No	PNS	I d	GOLONGAN												JML
			II				III				IV				
			A	b	c	d	A	b	c	d	a	b	c	d	
1	Camat										1			1	
2	Sekretariat									1				1	
3	Subag Umpeg						1							1	
4	Subag PK								1					1	
5	Kasi PM							1						1	
6	Kasi Tapem														
7	Kasi Trantib								1					1	
8	Kasi Yanmum & Kesos									1				1	
9	Staf				1	2		3						6	
	JUMLAH				1	2		4	1	2	2	1		13	

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kec. Poncowarno, 2022

1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan Poncowarno dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 5).

Sistem, prosedur dan mekanisme kerja organisasi Kecamatan Poncowarno dalam pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut:

1. Secara internal, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan tugasnya pokok fungsinya;
2. Secara eksternal, selalu berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Poncowarno (Kepala Kepolisian Sektor dan Kepala Pos Rayon Militer) serta unit-unit pelaksana teknis dinas/badan seperti Korwil Bidang Pendidikan, Koordinator Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan, Koordinator Dinas Sosial dan Keluarga Berencana, UPT Dinas Kesehatan, UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, SMP Negeri Poncowarno, SMP Negeri Satu Atap Poncowarno, Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan, Penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan serta OPD se-Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok fungsinya;
3. Setiap pejabat wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan jalan keluar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setiap pejabat bertanggungjawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
5. Setiap aparatur kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya terkait pelaksanaan tugas-tugas yang diembannya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, susunan kepegawaian dan kelengkapan organisasi Kecamatan Poncowarno adalah sebagai berikut:

- I. Camat dijabat oleh Julin, S.STP, M. Si, mempunyai tugas

memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan. Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan;
- i. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretaris Camat dijabat oleh Nasrudin, S.IP., M.M, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;

- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

III. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dijabat oleh Istikomah, S.ST., dengan dibantu oleh staf yaitu : Minarto, Mokhamad Tosin, dan Siti Laelatussolikhah, A.Md.Akun, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

IV. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dijabat oleh Nurjanah, SE, dengan dibantu oleh staf yaitu : Basuki serta 1 (satu) orang THL atas nama Suryanto, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

V. Plt. Kepala Seksi Tata Pemerintahan dijabat oleh Adi Buntoro, S.E, M.Si mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber- sumber pendapatan dan kekayaan desa;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa beserta perangkat desa;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dijabat oleh Adi Buntoro, S.E, M.Si, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di

wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VII. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dijabat oleh Darmiyati, S.A.P, dibantu oleh staf Endra Saeful Asrof, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;

- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dijabat oleh Wahjoe BP, SE, MM dan dibantu oleh Sri Suryati dan 2 (dua) orang THL, Fauziah Tri Hastuti dan Susiyanto, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

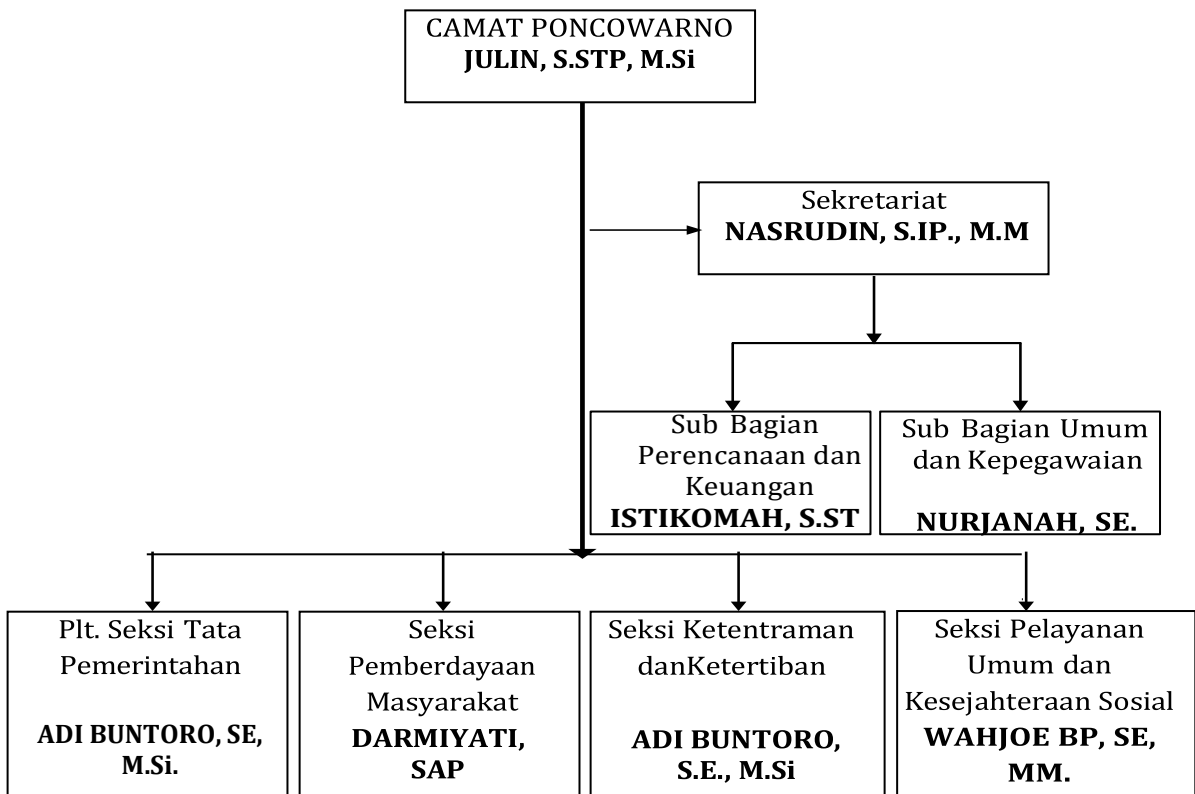
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olahraga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Guna memperjelas gambaran mengenai susunan kepegawaian dan kelengkapan organisasi Kecamatan Poncowarno sebagaimana telah diuraikan di awal, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan Kecamatan, Struktur Organisasi Kecamatan Poncowarno sebagai berikut :

Diagram 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan Poncowarno



1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Utama

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah
Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan yang terkait dengan hal-hal pelayanan Perangkat Daerah kecamatan, sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kelembagaan penyelenggaraan urusan pemerintah dimana peningkatan kualitas SDM belum sesuai dengan yang dibutuhkan;
2. Penyediaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan sebagai bahan perencanaan kurang memadai;
3. Cepatnya reformasi birokrasi dan perubahan regulasi di tingkat nasional belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di daerah;
4. Adanya perubahan regulasi di tingkat Kabupaten.

B. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, diantaranya:

1. Dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terkait dengan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban pada Tahun 2022 sangat terpengaruh dengan dampak pandemic, dan regulasi yang berubah-ubah;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

C. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah diantaranya:

1. Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah sesuai mekanisme dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peningkatan kapasitas birokrasi dan profesionalisme aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintah daerah yang efektif, efisien responsif, transparan dan akuntabel;
3. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

D. Isu-isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis
Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, diantaranya:

1. Perlunya penataan ulang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan untuk lebih optimal dalam mewujudkan kinerja organisasi;
2. Perubahan regulasi perencanaan (*e-planning*) dan penganggaran (*e-budgeting*) belum terintegrasi dengan baik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

A. Visi Kecamatan Poncowarno

Visi Kecamatan Poncowarno mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Periode Tahun 2021-2026 yaitu:

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”**

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemetaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh.

Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desamandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- Berakhlak menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

B. Misi Kecamatan Poncowarno

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan: kondisi dan permasalahan yang ada; tantangan ke depan; serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) Misi Kecamatan Poncowarno yang juga mengacu pada Misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Periode Tahun 2016-2022, yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Poncowarno mengacu pada Misi Ke-1 yaitu :

Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00

Sumber : Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026

D. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi / Rumus Perhitungan
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	Nilai	Jumlah Masyarakat Puas/ Jumlah layanan

Sumber : Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2021-2026

E. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022. Berikut Rencana Kinerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2022
Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	%	85,00

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Pada tanggal 11 Januari 2022 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno
Tahun 2022

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan:							
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	%	61,33				61,33
	Sasaran:							
2	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85				85

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Poncowarno:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Kecamatan Poncowarno
Tahun 2022

No.	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.620.453.000,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	85,50%	57.250.000,00
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks kondusivitas kecamatan	100%	21.750.000,00
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	24,05%	88.250.000,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 29 September 2022 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno
Tahun 2022

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan:							
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	%	61,33				61,33
	Sasaran:							
2	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85				85

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Program dan Kegiatan Kecamatan Poncowarno
Tahun 2022

No.	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.904.880.000,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	85,50%	57.250.000,00
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks kondusivitas kecamatan	100%	21.750.000,00
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	24,05%	88.250.000,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-rata % Capaian
1.	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2.	Baik	$X = 100$
3.	Cukup	$80 < X < 100$
4.	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5.	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Poncowarno.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Poncowarno Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2022	Realisasi	Capaian %
(1)		(2)	(3)	(5)	(4)	(4)
1.	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	85,00	91,22	107,31

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai target yang telah direncanakan.

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau Tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	2021			2022		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	84,00	85,82	102,16	85,00	91,22	107,31

Uraian penjelasan tabel :

Pada Tahun 2022 secara umum terjadi peningkatan capaian realisasi target kinerja. Secara umum, hal ini dipengaruhi oleh perubahan dokumen Renstra Kecamatan yang diikuti dengan dokumen-dokumen yanglainnya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.4
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program /Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	91,22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
2.				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	107,31	Menunjang
3.				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks kondusivitas kecamatan	100	Menunjang
4.				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	54,54	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum, seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai rencana, target dari masing-masing program dan kegiatan telah tercapai secara maksimal.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Organisasi
Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Kecamatan Poncowarno
Tahun 2021 – 2026 Sampai Dengan Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	11	11	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	5	5	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	6	6	100%

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	12	12	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang	16	13	81,25%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Jenis	4	3	75%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	12	12	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis	4	4	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	100%
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Orang	8	8	100%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan fasilitas arsip	Bulan	12	12	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	1	1	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit pengadaan sarpras gedung kantor	unit	1	1	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	100%

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	bulan	12	12	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	24	24	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Unit	12	12	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja	Unit	10	10	100%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	unit	2	2	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan	%	85,00	91,22%	107,31%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	jenis	5	5	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	jenis	5	5	100%
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks kondusivitas kecamatan	%	100	100	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	kegiatan	2	2	100%

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan & Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Hari Jadi, HUT RI, Malam Tasyakuran)	kegiatan	2	2	100%
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri	%	24,05	54,54	226,77%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan pengawasan pemerintahan desa	kegiatan	6	6	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan dan penyusunan APBDes	desa	11	11	100%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	dokumen	2	2	100%
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	kali	1	1	100%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi dalam rangka kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	kegiatan	1	1	100%
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa (pembinaan BUMDes, UKS, PKK, dan Sosmasy)	kegiatan	4	4	100%
	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah kegiatan Fasilitasi TKP2Kdes	kegiatan	2	2	100%

Selama tahun 2022 Pemerintah Kecamatan Poncowarno sesuai tugas pokok fungsi dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah telah berjalan dengan baik, hal ini diukur dari pencapaian kinerja organisasi dengan capaian kinerja 100%.

3.2. Realisasi Anggaran

Evaluasi dan analisis kinerja Kecamatan Poncowarno pada tahun 2022 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Capaian Program dan Kegiatan

URAIAN JENIS BELANJA PER KEGIATAN	ANGGARAN T.A. 2022	REALISASI T.A. 2022	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000,00	10.962.600,00	99,66
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	5.980.100,00	99,67
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	909.000,00	909.000,00	100,00
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	583.000,00	582.100,00	99,85
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	651.000,00	650.000,00	99,85
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	1.374.000,00	1.374.000,00	100,00
5. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	563.000,00	545.000,00	96,80
6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	100,00
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.982.500,00	99,65
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	891.000,00	887.500,00	99,61
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	326.000,00	325.000,00	99,69
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00

4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	813.000,00	800.000,00	98,40
5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	100,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.738.391.000,00	1.605.995.365,00	92,38
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.719.391.000,00	1.587.531.555,00	92,33
1. Belanja Gaji Pokok PNS	751.000.000,00	729.767.260,00	97,17
2. Belanja Tunjangan Keluarga PNS	70.000.000,00	63.703.735,00	91,01
3. Belanja Tunjangan Jabatan PNS	76.000.000,00	73.700.000,00	96,97
4. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00
5. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.000.000,00	15.105.000,00	88,85
6. Belanja Tunjangan Beras PNS	41.000.000,00	36.282.420,00	88,49
7. Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	9.000.000,00	7.629.471,00	84,77
8. Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.000,00	8.877,00	63,41
9. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	58.133.000,00	52.216.128,00	89,82
10. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.020.000,00	1.494.212,00	49,48
11. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.600.000,00	4.482.697,00	46,69
12. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-	-
13. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	684.624.000,00	603.141.755,00	88,10

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	19.000.000,00	18.463.810,00	97,18
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.300.000,00	5.820.000,00	92,38
2. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
3. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00
4. Belanja Lembur	4.350.000,00	4.350.000,00	100,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	134.000,00	108.351,00	80,86
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	166.000,00	135.459,00	81,60
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.739.000,00	33.220.500,00	98,46
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.750.000,00	1.741.000,00	99,48
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik	1.750.000,00	1.741.000,00	99,48
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	7.613.500,00	95,16
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	8.000.000,00	7.613.500,00	95,16

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
1. Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	7.089.000,00	6.993.000,00	98,64
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	2.043.000,00	2.023.000,00	99,02
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	2.402.000,00	2.400.000,00	99,91
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	2.644.000,00	2.570.000,00	97,20
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.650.000,00	1.623.000,00	98,36
1. Belanja Bahan – Bahan Lainnya	19.000,00	18.000,00	94,73
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	980.000,00	975.000,00	99,48
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	651.000,00	630.000,00	96,77
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
1. Belanja Bahan – Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.304.000,00	2.304.000,00	100,00
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Perabot Kantor	1.736.000,00	1.736.000,00	100,00
3. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	480.000,00	480.000,00	100,00
4. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.480.000,00	5.480.000,00	100,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.750.000,00	63.054.941,00	90,40
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.750.000,00	44.079.441,00	86,85
1. Belanja Tagihan Telepon	400.000,00	335.560,00	83,89
2. Belanja Tagihan Listrik	42.950.000,00	36.948.431,00	86,02
3. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/ TV Berlangganan	7.400.000,00	6.795.450,00	91,83
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.000.000,00	17.975.500,00	99,86
1. Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.139.000,00	3.121.000,00	99,42
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	929.000,00	922.500,00	99,30
3. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.932.000,00	13.932.000,00	100,00

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.000.000,00	41.022.981,00	97,67
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.000.000,00	20.036.481,00	95,41
1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.640.000,00	13.639.731,00	99,99
2. Belanja Suku Cadang – Suku Cadang Alat Angkutan	3.360.000,00	3.354.000,00	99,82
3. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.000.000,00	2.050.000,00	68,33
4. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Penumpang	1.000.000,00	992.750,00	99,27
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
1. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.986.500,00	99,93
1. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.371.000,00	14.370.000,00	99,99
2. Belanja Bahan – Bahan Lainnya	1.869.000,00	1.866.500,00	99,86
3. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.760.000,00	3.750.000,00	99,73
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	57.250.000,00	53.986.125,00	94,29
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	57.250.000,00	53.986.125,00	94,29
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	57.250.000,00	53.986.125,00	94,29
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.295.000,00	4.305.000,00	81,30
2. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.260.000,00	2.260.000,00	100,00
3. Belanja Bahan-Bahan Lainnya	983.000,00	978.500,00	99,54
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	1.573.000,00	1.571.000,00	99,87
5. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	651.000,00	650.000,00	99,84
6. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	3.110.000,00	2.870.000,00	92,28
7. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	1.210.000,00	1.210.000,00	100,00
8. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	100,00
9. Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.248.000,00	38.221.625,00	94,96
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.750.000,00	21.595.000,00	99,28
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.750.000,00	21.595.000,00	99,28

Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21.750.000,00	21.595.000,00	99,28
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	957.000,00	837.000,00	87,46
2. Belanja Bahan – Bahan Lainnya	2.570.000,00	2.550.000,00	99,22
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	532.000,00	518.000,00	97,36
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik	103.000,00	102.500	99,51
5. Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.088.000,00	7.087.500,00	99,99
6. Belanja Natura dan Pakan - Natura	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.300.000,00	8.300.000,00	100,00
8. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88.250.000,00	86.050.700,00	97,51
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88.250.000,00	86.050.700,00	97,51
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.000.000,00	15.478.300,00	96,73
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	600.000,00	120.000,00	20,00
2. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	1.116.000,00	1.112.500,00	99,68
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	550.000,00	550.000,00	100,00
5. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	3.027.000,00	3.025.800,00	99,96
6. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	1.392.000,00	1.355.000,00	97,34
7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.840.000,00	5.840.000,00	100,00
8. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.475.000,00	1.475.000,00	100,00
Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.500.000,00	7.140.000,00	95,20
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	360.000,00	0,00	0,00
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	260.000,00	260.000,00	100,00
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	110.000,00	110.000,00	100,00

4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	450.000,00	450.000,00	100,00
5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.720.000,00	4.720.000,00	100,00
6. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.750.000,00	9.584.000,00	98,29
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	120.000,00	0,00	0,00
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	374.000,00	366.000,00	97,86
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	110.000,00	110.000,00	100,00
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	478.000,00	478.000,00	100,00
5. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.568.000,00	2.530.000,00	98,52
6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
7. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
8. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000,00	19.897.400,00	99,48
1. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	916.000,00	914.000,00	99,78
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	550.000,00	550.000,00	100,00
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	2.924.000,00	2.823.400,00	96,55
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	500.000,00	500.000,00	100,00
5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.560.000,00	10.560.000,00	100,00
6. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
7. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	30.000.000,00	29.313.500,00	97,71
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.785.000,00	4.185.000,00	87,46
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	838.000,00	831.500,00	99,22
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	550.000,00	545.000,00	99,09
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	2.532.000,00	2.532.000,00	100,00
5. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	895.000,00	820.000,00	91,62
6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	15.400.000,00	100,00
7. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
8. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00

Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000,00	4.637.500,00	92,75
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	360.000,00	0,00	0,00
2. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	300.000,00	297.500,00	99,16
3. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	110.000,00	110.000,00	100,00
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	855.000,00	855.000,00	100,00
5. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	375.000,00	375.000,00	100,00
6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Jumlah Belanja	2.072.130.000,00	1.925.888.212,00	92,94

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran, Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja				Anggaran			
		Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan	85,00	91,22	107,31	2.072.130.000	1.925.888.212	92,94	7,06

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum, penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal, dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2022. Pembuatan LKJiP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen menetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 107,31 kategori sangat baik)
- Sasaran Meningkatnya kualitas layanan masyarakat terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,22%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 (satu) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.072.130.000,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.1.925.888.212,00 dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2022 serapan anggaran sebesar 92,94% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 7,06%.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Memedomani ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 wajib kiranya hasil LKjIP tahun berkenaan dipakai sebagai bahan penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program terkait dengan: (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan (b) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat Daerah).

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan Poncowarno, maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Poncowarno Tahun 2022 diucapkan terima kasih, dengan harapan sebagai bentuk dukungan terwujudnya Visi Kabupaten Kebumen : Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat.

Poncowarno, 31 Januari 2023


CAMAT PONCOWARNO
KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO
JULIN, S.STP, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19791221 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279
Kode Pos 54393

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TJAHO SAMBODO NUGRAHANINGWIDI, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Camat Poncowarno
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO, SH
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2022

Pihak Kedua,



H. ARIF SUGIYANTO, SH

Pihak Pertama,



TJAHO SAMBODO NUGRAHANINGWIDI, S.Sos., M.Si.
NIP. 197012211992031006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN PONCOWARNO

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	61,33				61,33
	Sasaran :							
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85				85

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.620.453.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 57.250.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 21.750.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 88.250.000,-	APBD

Kebumen, 11 Januari 2022

Bupati Kebumen,

Camat Poncowarno,



H. ARIF SUGIYANTO, SH



TJAHJO SAMBODO NUGRAHANINGWIDI, S.Sos., M.Si.
NIP. 197012211992031006



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279
Kode Pos 54352

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULIN, S.STP, M.Si.
Jabatan : Camat Poncowarno
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO, SH
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 29 September 2022

Pihak Kedua,


H. ARIF SUGIYANTO, SH

Pihak Pertama,


JULIN, S.STP, M.Si.
NIP. 19791221 199912 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN PONCOWARNO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan :								
1.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	61,33	61,33				61,33
Sasaran :								
2.	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85				85

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp 1.620.453.000,-	Rp 1.904.880.000,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 57.250.000,-	Rp 57.250.000,-	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 21.750.000,-	Rp 21.750.000,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 88.250.000,-	Rp 88.250.000,-	APBD

BUPATI KEBUMEN,


H. ARIF SUGIYANTO, SH

Kebumen, 29 September 2022

CAMAT PONCOWARNO,



JULIN, S.STP, M.Si.
NIP. 19791221 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279
Kode Pos 54352

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NASRUDIN, S.IP, MM
Jabatan : Sekretaris Camat Poncowarno
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : JULIN, S.STP, M.Si.
Jabatan : Camat Poncowarno
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

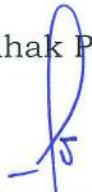
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 29 September 2022

Pihak Kedua,


JULIN, S.STP, M.Si.
NIP. 19791221 199912 1 001

Pihak Pertama,


NASRUDIN, S.IP, MM
NIP. 19670905 198903 1 013

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H
NIP. 19641117 199201 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIS CAMAT PADA KECAMATAN PONCOWARNO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Perencanaan, Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang sesuai standar.	100%	100%	28%	32%	21%	19%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp 1.620.453.000,-	Rp 1.904.880.000,-	APBD

Kebumen, 29 September 2022



JULIN, S.STP, M.Si.

NIP. 19791221 199912 1 001

Sekretaris Camat,

NASRUDIN, SIP, MM

NIP. 19670905 198903 1 013

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H

NIP. 19641117 199201 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279
Kode Pos 54352

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURJANAH, SE
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Poncowarno
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NASRUDIN, S.IP, MM
Jabatan : Sekretaris Camat Poncowarno
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 29 September 2022

Pihak Kedua,

NASRUDIN, S.IP, MM
NIP. 19670905 198903 1 013

Pihak Pertama,

NURJANAH, SE
NIP. 19760505 199903 2 007

Mengetahui,
CAMAT PONCOWARNO,



JULIN, S.STP, M.Si.
NIP. 19791221 199912 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PADA KECAMATAN PONCOWARNO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	26%	27%	32%	15%
2.	Meningkatnya layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tepat waktu	100%	100%	25%	25%	25%	25%
3.	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan penyediaan makanan dan minuman rapat yang sesuai aturan	100%	100%	22%	36%	33%	9%
4.	Meningkatnya layanan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	30%	30%	30%	10%
5.	Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	100%	25%	25%	25%	25%
6.	Meningkatnya layanan Penyediaan Bahan/Material	Persentase layanan Penyediaan Alat Tulis Kantor yang sesuai ketentuan	100%	100%	27%	23%	27%	23%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%	21%	21%	39%	19%
8.	Meningkatnya layanan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase layanan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	100%	100%	51%	-	49%	-
9.	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	0 unit	1 unit	-	-	-	1 unit
10.	Meningkatnya layanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	1 unit	-	-	-	1 unit
11.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	25%	25%	25%	25%
12.	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan penyediaan jasa surat-menyurat yang sesuai standar	100%	100%	33%	33%	34%	-
13.	Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan
14.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang sesuai ketentuan	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	26%	25%	26%	23%
15.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai ketentuan	100%	100%	58%	16%	16%	10%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional yang sesuai standar	100%	100%	20%	30%	31%	19%
17.	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin/pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	12 bulan	12 bulan	20%	40%	20%	20%
18.	Meningkatnya layanan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor atau bangunan lainnya	2 unit	2 unit	2 unit			

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp.1.750.000,00	Rp.1.750.000,00	APBD
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.9.000.000,00	Rp.9.000.000,00	APBD
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.8.000.000,00	Rp.8.000.000,00	APBD
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Rp.2.250.000,00	Rp.2.250.000,00	APBD
5.	Penyediaan Bahan/ Material	Rp.7.089.000,00	Rp.7.089.000,00	APBD
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.4.000.000,00	Rp.4.000.000,00	APBD
7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp.1.650.000,00	Rp.1.650.000,00	APBD
8.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Rp.10.000.000,00	APBD
9.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.1.000.000,00	Rp.1.000.000,00	APBD

10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.50.750.000,00	Rp.50.750.000,00	APBD
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.18.000.000,00	Rp.18.000.000,00	APBD
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.21.000.000,00	Rp.21.000.000,00	APBD
13.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.1.000.000,00	Rp.1.000.000,00	APBD
14.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.20.000.000,00	Rp.20.000.000,00	APBD

Kebumen, 29 September 2022

Sekretaris Camat,



NASRUDIN, S.IP, MM

NIP. 19670905 198903 1 013

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian,



NURJANAH, SE

NIP. 19760505 199903 2 007

Mengetahui,
CAMAT PONCOWARNO,



JULIN, S.STP, M.Si.

NIP. 19791221 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279
Kode Pos 54352

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISTIKOMAH, S.ST
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Poncowarno
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : NASRUDIN, S.IP, MM
Jabatan : Sekretaris Camat Poncowarno
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 29 September 2022


Pihak Kedua,


NASRUDIN, S.IP, MM
NIP. 19670905 198903 1 013

Pihak Pertama,


ISTIKOMAH, S.ST
NIP. 19790603 199903 2 004

Mengetahui,
CAMAT PONCOWARNO,


JULIN, S.STP, M.Si.
NIP. 19791221 199912 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
PADA KECAMATAN PONCOWARNO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	30%	33%	25%	12%
2.	Tersusunnya dokumen perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	22%	36%	26%	16%
3.	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	41%	29%	24%	6%
4.	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100%	100%	28%	32%	22%	18%
5.	Tersusunnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan yang sesuai tepat waktu	100%	100%	28%	32%	22%	18%
6.	Tersusunnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	100%	100%	24%	27%	27%	22%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 6.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	APBD
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-	APBD
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.1.444.964.000,-	Rp.1.719.391.000,-	APBD
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.19.000.000,-	Rp.19.000.000,-	APBD

Kebumen, 29 September 2022

Sekretaris Camat,

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan,


NASRUDIN, S.IP, MM

NIP. 19670905 198903 1 013


ISTIKOMAH, S.ST

NIP. 19790603 199903 2 004

Mengetahui,
CAMAT PONCOWARNO,



JULIN, S.STP, M.Si.
NIP. 19791221 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279
Kode Pos 54393

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARMIYATI, SAP
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Poncowarno
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TJAHO SAMBODO NW, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Camat Poncowarno
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2022

Pihak Kedua,



TJAHO SAMBODO NW, S.Sos, M.Si.
NIP. 19701221 199203 1 006

Pihak Pertama,

DARMIYATI, SAP
NIP. 19650509 200701 2 013

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. AHMAD LIANG SUGIONO, S.H
NIP. 19641117 199201 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA
KECAMATAN PONCOWARNO


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitas rekomendasi dan koordinasi pengawasan pemerintahan desa yang sesuai ketentuan	100%
2.	Meningkatnya layanan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase layanan fasilitas desa musrenbangdes dan musrenbangcam yang sesuai ketentuan	100%
3.	Meningkatnya layanan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase layanan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa (Pembinaan PKK, UKS, BUMDES, Sosmas) yang sesuai ketentuan	100%

NO.	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000,00	APBD
2.	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	30.000.000,00	APBD

Kebumen, 11 Januari 2022

Camat Poncowarno,

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat,


TJAHJO SAMBODO NW, S.Sos, M.Si.
NIP. 19701221 199203 1 006


DARMIYATI, SAP
NIP. 19650509 200701 2 013

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H
NIP. 19641117 199201 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279
Kode Pos 54393

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITI MULYATI, S.Sos
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Poncowarno
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TIAHJO SAMBODO NW, S.Sos, M.Si.
Jabatan : Camat Poncowarno
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2022

Pihak Kedua,



TIAHJO SAMBODO NW, S.Sos, M.Si.
NIP. 19701221 199203 1 006

Pihak Pertama,

TITI MULYATI, S.Sos
NIP. 19641010 198603 2 019

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H
NIP. 19641117 199201 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN PADA
KECAMATAN PONCOWARNO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitas rekomendasi dan koordinasi pengawasan pemerintahan desa yang sesuai ketentuan	100%
2.	Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase layanan fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa yang sesuai ketentuan	100%

NO.	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.000.000,00	APBD
2.	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.500.000,00	APBD

Kebumen, 11 Januari 2022

Camat Poncowarno,

Kepala Seksi Tata Pemerintahan,



TJAHJO SAMBODO NW, S.Sos, M.Si.
NIP. 19701221 199203 1 006

TITI MULYATI, S.Sos
NIP. 19641010 198603 2 019

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H
NIP. 19641117 199201 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279
Kode Pos 54393

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI BUNTORO, SE, M.Si.
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Poncowarno
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TJAHO SAMBODO NW, S.Sos, M.Si.
Jabatan : Camat Poncowarno
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

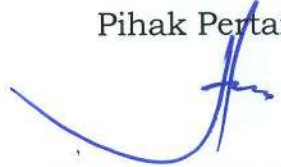
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 21 Februari 2022

Pihak Kedua,


TJAHO SAMBODO NW, S.Sos, M.Si.
NIP. 19701221 199203 1 006

Pihak Pertama,


ADI BUNTORO, SE, M.Si.
NIP. 19791019 201001 1 006

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H
NIP. 19641117 199201 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PADA
KECAMATAN PONCOWARNO


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase layanan penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%
2.	Meningkatnya layanan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar	Prosentase layanan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai ketentuan.	100%

NO.	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.000.000,00	APBD
2.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.500.000,00	APBD

Kebumen, 21 Februari 2022

Camat Poncowarno,

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban,


TJAHJO SAMBODO NW, S.Sos, M.Si.
 NIP. 19701221 199203 1 006


ADI BUNTORO, SE, M.Si.
 NIP. 19791019 201001 1 006

Mengetahui,
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN


H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H
 NIP. 19641117 199201 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO

Jalan Raya Poncowarno KM 1 Telp. 08112665279
Kode Pos 54393

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHJOE BOEDI PRASETIJO, SE, MM
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Poncowarno
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TJAHO SAMBODO NW, S.Sos, M.Si.
Jabatan : Camat Poncowarno
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

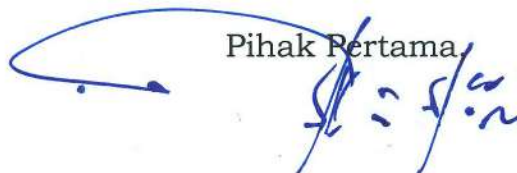
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 11 Januari 2022

Pihak Kedua,


TJAHO SAMBODO NW, S.Sos, M.Si.
NIP. 19701221 199203 1 006

Pihak Pertama,


WAHJOE BOEDI PRASETIJO, SE, MM
NIP. 19690720 199102 1 001

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H
NIP. 19641117 199201 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA KECAMATAN PONCOWARNO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase layanan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang sesuai ketentuan	100%
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase layanan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%
3.	Meningkatnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase layanan fasilitasi penanggulangan kemiskinan	100%

NO.	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN*
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	57.250.000,00	APBD
2.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.000.000,00	APBD

Kebumen, 11 Januari 2022

Camat Poncowarno,



TJAHJO SAMBODO NW, S.Sos, M.Si.
NIP. 19701221 199203 1 006

Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial,

WAHJOE BOEDI PRASETIJO, SE, MM
NIP. 19690720 199102 1 001

Mengetahui,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H
NIP. 19641117 199201 1 002

REALISASI KEGIATAN TAHUN 2022

URAIAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2,072,130,000	1,925,888,212	145,076,998	92.94
KECAMATAN PONCOWARNO	2,072,130,000	1,925,888,212	145,076,998	92.94
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,904,880,000	1,764,256,387	140,087,423	92.62
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,000,000	10,962,600	37,400	99.66
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,000,000	5,980,100	19,900	99.67
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000	4,982,500	17,500	99.65
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,738,391,000	1,605,995,365	131,859,445	92.38
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,719,391,000	1,587,531,555	131,859,445	92.33
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	19,000,000	18,463,810		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	33,739,000	33,220,500	518,500	98.46
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,750,000	1,741,000	9,000	99.49
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9,000,000	9,000,000	0	100.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,000,000	7,613,500	386,500	95.17
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,250,000	2,250,000	0	100.00
Penyediaan Bahan/Material	7,089,000	6,993,000	96,000	98.65
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,000,000	4,000,000	0	100.00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,650,000	1,623,000	27,000	98.36
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10,000,000	10,000,000	0	100.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000	10,000,000	0	100.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69,750,000	63,054,941	6,695,059	90.40
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000	1,000,000	0	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,750,000	44,079,441	6,670,559	86.86
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18,000,000	17,975,500	24,500	99.86
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42,000,000	41,022,981	977,019	97.67
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21,000,000	20,036,481	963,519	95.41
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,000,000	1,000,000	0	100.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000	19,986,500	13,500	99.93
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	57,250,000	53,986,125	3,263,875	94.30
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	57,250,000	53,986,125	3,263,875	94.30
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan	57,250,000	53,986,125	3,263,875	94.30
Program Penyelenggaraan Urusan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21,750,000	21,595,000	155,000	99.29

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	21,750,000	21,595,000	155,000	99.29
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21,750,000	21,595,000	155,000	99.29
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88,250,000	86,050,700	1,570,700	97.51
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88,250,000	86,050,700	1,570,700	97.51
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16,000,000	15,478,300	521,700	96.74
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7,500,000	7,140,000		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9,750,000	9,584,000		
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20,000,000	19,897,400		
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	30,000,000	29,313,500	686,500	97.71
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5,000,000	4,637,500	362,500	92.75
	JUMLAH	2,072,130,000	1,925,888,212	145,076,998	92.94